

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pembahasan berisi teknis dan substansi dalam skripsi ini. Bagian teknis substansi terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori dan hipotesis. Sedangkan untuk bagian teknis terdiri dari tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak puluhan tahun yang lalu, sejarah mencatat bahwa perempuan di seluruh dunia masih menjadi pihak yang berdampak atau menjadi pihak yang rentan mengalami penindasan gender dan memperjuangkan hak-hak fundamental mereka sebagai manusia. Diskriminasi berbasis gender atau penindasan berdasarkan gender masih menjadi isu yang diperbincangkan di tingkat global dan terjadi di seluruh lapisan budaya. Dalam beberapa kondisi di berbagai negara, hak-hak perempuan sebagai pihak yang rentan akan diskriminasi berbasis gender, dihilangkan dan dianggap bukan bagian dari hak asasi manusia, sehingga memunculkan adanya penindasan berdasarkan gender. Salah satu isu penindasan berdasarkan gender yang belakangan ini menjadi fokus global adalah kekerasan berbasis gender.

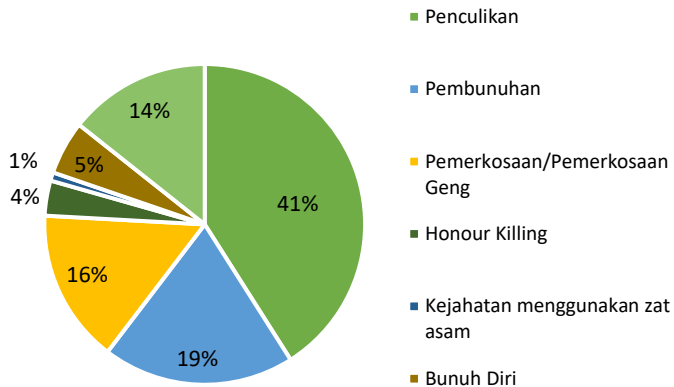
Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu bentuk dari diskriminasi berbasis gender, diartikan sebagai setiap tindakan pembedaan, pengucilan, atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin dengan tujuan atau akibat untuk mengurangi menghilangkan

pengakuan, kebebasan, atau kegiatan yang biasanya merujuk kepada perempuan sebagai korban. Kekerasan berbasis gender memberikan dampak yang luar biasa bagi korban maupun penyintas. Dampak yang didapat oleh korban maupun penyintas kekerasan berbasis gender merusak kesehatan fisik dan mental, rasa aman, hingga martabat yang membekas dalam jangka waktu yang lama hingga seumur hidup. Kekerasan berbasis gender yang dialami pun tidak hanya secara fisik maupun seksual, namun juga kekerasan emosional dan kekerasan verbal (UNHCR, 2009).

Salah satu negara dengan tingkat kekerasan berbasis gender yang cukup tinggi adalah Pakistan. Meskipun Pakistan telah menjamin kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan, tindak kekerasan berbasis gender di Pakistan tiap tahunnya terus meningkat dan berada pada tingkat yang mengkhawatirkan (Aurat Foundation, 2020).

Pakistan juga menempati peringkat 153 dari 156 negara dan peringkat 7 dari 8 negara di Asia Selatan dalam laporan kesenjangan gender global (World Economic Forum, 2021). Hal ini disebabkan adanya perbedaan pola pikir terhadap konsep kesetaraan gender dan sistem patriarki yang tertanam secara struktural dalam masyarakat Pakistan. Narasi ini kemudian menyulitkan perlawanan perempuan Pakistan untuk memperjuangkan hak mereka dan menghapuskan kekerasan berbasis gender yang mereka alami.

Diagram 1.1. Jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan berdasarkan 25 kabupaten di Pakistan selama Januari-Desember 2020



Sumber: *Violence against Women & Girls in the Times of Covid-19 Pandemic*, Aurat Foundation (2020)

Berbagai usaha advokasi telah dilakukan perempuan Pakistan untuk memperjuangkan hak dan menghapuskan ketidaksetaraan gender. Usaha yang telah dilakukan contohnya adalah melakukan kampanye, pawai atau demonstrasi di jalanan, kegiatan melobi, membuat petisi, hingga memobilisasi gerakan perempuan. Dalam sejarah panjang perjuangan perempuan Pakistan untuk mendapatkan hak mereka, *Aurat March* kemudian muncul sebagai salah satu bentuk perjuangan perempuan Pakistan dalam menyuarakan kesetaraan gender dan menuntut penghapusan kekerasan berbasis gender.

Aurat March merupakan sebuah demonstrasi sosial-politik tahunan di Pakistan yang bertujuan untuk

mencapai kesetaraan gender dan menghapuskan kekerasan berbasis gender, terutama bagi perempuan Pakistan yang rentan menjadi korban. Gerakan demonstrasi *Aurat March* ini sudah berlangsung sejak tahun 2018. Tiap tahunnya turun ke jalan-jalan di berbagai kota di Pakistan dan menggunakan platform media massa untuk memaksimalkan perjuangan perempuan Pakistan. Sejak kemunculannya, *Aurat March* telah melibatkan berbagai kolaborasi kolektif perempuan dengan berbagai grup sosial dan aktor-aktor advokasi (Saeed, 2018).

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana strategi advokasi *Aurat March* dalam mendorong penghapusan kekerasan berbasis gender di Pakistan?

C. KERANGKA TEORI

Untuk mengetahui usaha yang telah dilakukan *Aurat March*, maka digunakan pendekatan yang dapat memberikan penjelasan lengkap terkait *Aurat March* dalam mendorong penghapusan kekerasan berbasis gender, yaitu jaringan advokasi transnasional (*transnational advocacy networks*) atau TAN. Untuk menganalisis lebih jauh tentang strategi yang digunakan *Aurat March*, maka digunakan empat tipologi politik TAN.

Sedangkan teori kekerasan berbasis gender digunakan untuk menjabarkan bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di Pakistan sekaligus diperjuangkan untuk dieliminasi melalui *Aurat March*.

1. *Transnational Advocacy Networks (TAN)*

Menurut Keck & Sikkink (1999), jaringan advokasi transnasional adalah sebuah proses untuk mengubah dan mempengaruhi suatu kebijakan publik, di mana kebijakan yang dimaksud adalah isu-isu yang berkembang dalam lingkup transnasional atau lintas negara (tidak terbatas kepada isu tradisional saja, namun juga isu kontemporer). Kegiatan advokasi ini melibatkan aktor-aktor yang bekerja menangani isu transnasional dan berbagi nilai-nilai yang sama untuk memperjuangkan suatu norma atau nilai. Aktor-aktornya pun tidak terbatas kepada lembaga-lembaga resmi saja, namun juga menysasar lembaga swasta bahkan individu.

Hampir sebagian besar kasus atau isu advokasi berawal dari adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah atau isu/permasalahan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Hal ini menyebabkan tidak diakuinya hak individu maupun kelompok. Padahal seharusnya pemerintah adalah penjamin utama hak asasi manusia rakyat mereka, tetapi secara tidak langsung pemerintah juga termasuk sebagai pelanggar utama. Korban atau pihak yang merasa dirugikan akan pelanggaran tentu saja tidak mendapatkan advokasi dari pemerintah untuk mendapatkan hak mereka, sehingga mereka memilih untuk mencari dukungan melalui jaringan internasional. Banyak jaringan advokasi internasional memiliki koneksi dengan aktivis di negara maju satu dengan aktivis di negara maju maupun negara berkembang lain. Jenis hubungan tersebut biasanya memiliki tujuan untuk mempengaruhi perilaku negara ketika hubungan

antara negara dengan aktor domestik terputus, maka NGO lokal akan mencari bantuan internasional secara langsung untuk memberikan tekanan dari luar untuk negara mereka (Keck & Sikkink, 1999).

Dalam kegiatan advokasi, jaringan advokasi internasional menggunakan berbagai cara, sehingga mereka harus menggunakan kekuatan informasi, ide, dan strategi untuk mengubah informasi dan konteks nilai di dalam negara yang membuat kebijakan terkait isu yang diadvokasi. Hal ini menyebabkan munculnya tipologi advokasi berbentuk strategi yang sering digunakan jaringan/koneksi dalam mengadvokasi isu-isu, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, serta *accountability politics* (Keck & Sikkink, 1999). Penelitian ini menggunakan empat tipologi politik TAN tersebut untuk menganalisa lebih lanjut terkait strategi yang digunakan *Aurat March* dalam mendorong penghapusan kekerasan berbasis gender di Pakistan.

a. *Information politics* (Politik Informasi)

Information politics merupakan strategi advokasi yang berperan memindahkan informasi yang dapat digunakan secara politik dengan cepat dan kredibel ke tempat yang dianggap akan berdampak atas informasi tersebut. Dalam konteks aktor advokasi, informasi ini mengikat para anggota dalam jaringan dan sangat penting untuk efektivitas kerja jaringan. Kemampuan ini menyediakan informasi yang kemungkinan besar tidak tersedia dari sumber yang mungkin tidak pernah didengar sebelumnya, dan membuat informasi tersebut mudah dipahami sehingga akan berguna untuk aktivis

dan publik yang mungkin secara geografis dan/atau jauh secara sosial (Keck & Sikkink, 1999).

Informasi yang didapat tidak sebatas fakta atau data yang relevan saja, namun juga kesaksian melalui cerita yang diceritakan oleh orang-orang yang hidupnya mendapat pengaruh dari isu yang diadvokasi. Aktor advokasi kemudian menerjemahkan fakta dan kesaksian tersebut; meringkaskan masalah secara sederhana dalam hal moral (benar atau salah) karena tujuan advokasi adalah membujuk, merayu, dan memunculkan kesadaran untuk mengambil tindakan. Media, terutama media massa, berperan penting dalam jaringan politik informasi. Untuk mendapatkan lebih banyak khalayak, jaringan harus berusaha menarik perhatian pers sehingga aktivis jaringan harus mengemas informasi terkait isu yang diadvokasi dengan dramatis dan tepat waktu. Selain menggunakan media, aktor-aktor advokasi tingkat lokal juga mendapatkan informasi lain melalui jaringan di lingkup internasional. Sebagai timbal balik, aktor-aktor advokasi tersebut kemudian membantu melindungi jaringan mereka dalam melakukan pekerjaan mereka (Keck & Sikkink, 1999).

Untuk mendorong penghapusan kekerasan berbasis gender di Pakistan, *Aurat March* menggunakan *information politics* untuk menyebarkan informasi tentang isu kekerasan berbasis gender melalui media. Media, termasuk media massa dan media sosial, dalam *information politics* dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran (*raising awareness*), memberikan perspektif baru tentang isu-isu advokasi melalui penyampaian informasi atas isu, menciptakan

dialog publik, menargetkan pembuat kebijakan, hingga membentuk opini publik melalui penyajian informasi atau berita terkait penghapusan kekerasan berbasis gender. Agar bisa mendapatkan lebih banyak perhatian terhadap isu penghapusan kekerasan berbasis gender, para aktivis yang mengorganisir *Aurat March* kemudian mencari bantuan dan bertukar informasi dengan pihak atau aktor advokasi lain. Bantuan ini akan memperkuat informasi dan posisi isu yang diadvokasi untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dari masyarakat umum, sekaligus menciptakan opini publik tentang isu-isu gender yang dibawakan dalam *Aurat March*.

b. *Symbolic Politics* (Politik Simbolik)

Symbolic politics (politik simbolik) merupakan strategi advokasi yang berperan untuk menggunakan simbol, tindakan, atau cerita yang masuk akal atau mengklaim pendengar yang berjarak jauh. Aktivis advokasi membingkai isu dengan mengidentifikasi dan menyediakan penjelasan yang meyakinkan untuk peristiwa simbolik, yang berubah menjadi katalis (seseorang atau sesuatu yang memicu terjadinya suatu peristiwa) untuk pertumbuhan jaringan. Interpretasi ini kemudian menjadi bagian dari proses persuasi oleh jaringan untuk menciptakan kesadaran dan memperluas daerah pemilihan. Dalam kata lain, kegiatan persuasi melalui penyebaran penjelasan yang meyakinkan tentang peristiwa simbolik, yaitu isu advokasi, akan menciptakan kesadaran tentang isu tersebut sehingga informasi isu tersebar luas dan memberikan dampak bagi pejuang isu advokasi

maupun tujuan isu yang di advokasi (Keck & Sikkink, 1999).

Symbolic politics menjadikan *Aurat March* sebagai simbol perjuangan perempuan Pakistan untuk kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan berbasis gender dengan slogan yang selalu digaungkan yaitu *Mera Jism Meri Marzi (My Body My Choice)*. *Aurat March* hadir sebagai bentuk perlawanan perempuan Pakistan dalam mendapatkan hak mereka. Sejak tahun 2018, *Aurat March* menggunakan berbagai tema, slogan, dan *demands* (tuntutan) yang berbeda dalam memberikan pengaruh mereka sebagai simbol dari perlawanan patriarki yang merugikan perempuan. Contoh tema *Aurat March* 2018 adalah “*Equality*”, *Aurat March* 2019 adalah “*Sisterhood and Solidarity*”, *Aurat March* 2020 adalah “*Khudmukhtari (autonomy) and Violence (both sexual and economic)*”, serta *Aurat March* 2021 adalah “*Women’s Health Crisis (feminist care in the time of the coronavirus crisis)*”.

c. Leverage Politics (Politik Pengaruh)

Leverage politics (politik pengaruh) menggunakan aktor yang kuat untuk memberikan dampak pada sebuah situasi yang memiliki anggota jaringan lemah dan tidak memiliki pengaruh. Untuk memberikan perubahan kebijakan, jaringan perlu membujuk dan menekan aktor yang lebih kuat. Selain itu, untuk mendapatkan pengaruh, jaringan aktor advokasi juga harus mencari pengaruh –sebuah kata yang sering muncul dalam wacana organisasi advokasi– dari aktor yang memiliki pengaruh lebih kuat. Dengan mengerahkan pengaruh yang jauh di atas institusi yang

kuat, grup yang lemah mendapatkan pengaruh yang jauh di luar kemampuan mereka untuk mempengaruhi praktik negara secara langsung. Mengidentifikasi poin-poin pengaruh adalah langkah strategi yang krusial dalam kampanye jaringan (Keck & Sikkink, 1999).

Pengaruh yang dimaksud adalah *material leverage* dan *moral leverage*. *Material leverage* (pengaruh materi) berbentuk semacam isu yang saling berhubungan, biasanya melibatkan uang atau barang; namun juga berpotensi dalam pemilihan di organisasi internasional, lembaga/kantor yang prestisius, atau hal menguntungkan lainnya. Di sisi lain, *moral leverage* (pengaruh moral) melibatkan komentator atau komentar yang disebut sebagai “mobilisasi rasa malu” (*mobilisation of shame*) dengan perilaku aktor yang ditargetkan mengangkat ‘cahaya terang’ dari pengawasan internasional; ketika negara-negara menempatkan nilai yang tinggi pada prestis internasional, pengaruh ini akan efektif (Keck & Sikkink, 1999).

Leverage politics menggunakan aktor yang lebih kuat dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan maupun praktik yang dilakukan negara/pemerintah Pakistan. Dalam hal ini, *Aurat March* terus melakukan upaya untuk mendorong penghapusan kekerasan berbasis gender dengan melakukan berbagai bentuk strategi advokasi. Setelah itu, muncul respon dan adanya peningkatan tingkat kesadaran akan isu kekerasan berbasis gender dari publik; dalam kasus *leverage politics* adalah publik figur berpengaruh di Pakistan. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya publik figur Pakistan yang turut merayakan

International Women's Day setiap tanggal 8 Maret di media sosial maupun turut terjun ke jalan bersama aktivis *Aurat March* untuk merayakan *International Women's Day* di Pakistan, sebagai bentuk dukungan sekaligus menekankan pengaruh mereka dalam advokasi penghapusan kekerasan berbasis gender.

d. *Accountability Politics* (Politik Akuntabilitas)

Accountability politics (politik akuntabilitas) adalah satu dari strategi advokasi untuk mewajibkan aktor yang lebih kuat untuk bertindak berdasarkan kebijakan atau prinsip tidak jelas yang mereka dukung secara formal. Dalam konteks ini, jaringan advokasi telah memberikan banyak usaha untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lain untuk mengubah posisi mereka akan suatu isu. Hal ini seringkali diabaikan dan dianggap sebagai perubahan yang tidak penting dengan anggapan berdiskusi/berbicara adalah murah, sehingga pemerintah mengubah posisi diskursif dengan harapan mengubah atau mengalihkan fokus jaringan dan atensi publik. Aktivis jaringan advokasi, bagaimanapun, akan mencoba membuat pernyataan seperti itu dan membuatnya menjadi kesempatan untuk melakukan politik akuntabilitas. Saat pemerintah berkomitmen secara terbuka terhadap suatu prinsip, jaringan dapat menggunakan posisi tersebut dengan perintah informasi mereka untuk mengekspos jarak antara wacana dengan praktik/tindakan nyata. Hal ini kemudian akan menjadi memalukan bagi pemerintah yang mungkin mencoba untuk melindungi 'wajah'

mereka dengan cara menutup kesenjangan (Keck & Sikkink, 1999).

Accountability politics digunakan sebagai *counter-attack* dalam menekan pemerintah Pakistan. Dalam berbagai kesempatan, Pakistan selalu berbicara tentang berkomitmen dalam mencapai kesetaraan gender. Namun langkah kontradiktif terjadi karena ada perbedaan ucapan maupun tindakan antara Pemerintah Pakistan yang berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan berbasis gender, dengan tindakan maupun ucapan para penguasa di Pakistan, yang mayoritas adalah laki-laki. *Counter-attack* diluncurkan *Aurat March* dengan mengekspos berbagai tindakan maupun ucapan para penguasa di Pakistan yang tidak sesuai dengan prinsip maupun komitmen yang dilakukan Pakistan. *Counter-attack* ini kemudian menjadi informasi yang menyebar ke masyarakat bahwa Pemerintah Pakistan tidak serius dengan komitmen maupun usaha mereka dalam menjamin kesetaraan gender maupun melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender, sehingga *counter-attack* secara tidak langsung akan menekan Pakistan.

2. Kekerasan Berbasis Gender

Gender-based Violence (GBV) atau kekerasan berbasis gender merujuk kepada tindakan berbahaya yang dilakukan kepada individu atau seseorang berdasarkan gender mereka. Tindakan kekerasan berbasis gender melibatkan tindakan berbentuk fisik, seksual, psikologis/mental, hingga tindakan yang menimbulkan kesengsaraan seperti ancaman,

pemaksaan, serta perampasan kebebasan seseorang berdasarkan jenis kelamin mereka (UNFPA, 2020).

Kekerasan berbasis gender disebabkan oleh adanya kepercayaan dan pola pikir tradisional yang bersifat diskriminatif terhadap gender, yang melanggengkan ketidaksetaraan gender, terkhususnya pada perempuan dan anak perempuan. Faktor-faktor pendukung seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan dan pekerjaan, hingga impunitas atas kejahatan dan pelecehan, turut berkontribusi dan memperkuat budaya diskriminasi berbasis gender. Hal ini diperparah dengan minimnya tindakan atau kerangka hukum yang memadai mengakibatkan kurangnya mekanisme serta akses terhadap perlindungan maupun keadilan bagi korban/penyintas kekerasan berbasis gender. Akibat sedikitnya kerangka hukum sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi korban, mengakibatkan budaya impunitas atas kekerasan dan diskriminasi berbasis gender akan terus terjadi. (UNHCR, 2009).

Di sisi lain, pelaku kekerasan berbasis gender biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk mengontrol orang lain, baik di di ranah publik maupun privat. Dalam kebanyakan kasus kekerasan berbasis gender, pelaku adalah orang terdekat seperti anggota keluarga, pasangan, teman, guru, atau tokoh masyarakat. Tidak memungkiri bahwa pelaku juga berasal dari pihak otoritas (polisi, petugas penjara, anggota angkatan bersenjata dan kelompok, pekerja kemanusiaan, penjaga perdamaian) (UNHCR, 2009).

Tindakan kekerasan berbasis gender dapat didefinisikan secara luas dalam lima kategori yaitu

kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan emosional dan psikologis, praktik-praktik adat/tradisional berbahaya, serta kekerasan sosio-ekonomi. (UNHCR, 2009).

Tabel 1.1. Kategori Kekerasan Berbasis Gender (UNHCR, 2009)

Kekerasan Berbasis Gender (<i>Gender-based Violence/GBV</i>)	
Kekerasan Seksual	Termasuk dalam kejadian sebenarnya (yang telah terjadi), percobaan, maupun ancaman berbentuk pemerkosaan (<i>marital rape</i> , kekerasan dan eksploitasi seksual, pemerkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan prostitusi, intimidasi dan penghinaan berdasarkan seks, gender maupun orientasi seksual).
Kekerasan Fisik	Termasuk dalam kejadian sebenarnya (yang telah terjadi), percobaan, maupun ancaman berbentuk kekerasan fisik (menampar, memukul, praktik perbudakan, perekrutan paksa, perdagangan manusia).
Kekerasan Emosional dan Psikologis	Siksaan berbentuk verbal dan menyerang mental/psikologis korban (pelecehan, penghinaan yang merendahkan, memaksa seseorang untuk terlibat dalam tindakan penghinaan,

	pemaksaan pembatasan terhadap kebebasan dan hak untuk beraktivitas)
Praktik Adat yang berbahaya	Praktik adat berbahaya, termasuk mutilasi alat kelamin perempuan, pernikahan anak, <i>honour killings</i> , pembunuhan bayi, praktik aborsi berdasarkan jenis kelamin, pengabaian dan pelecehan berdasarkan jenis kelamin, penolakan atas akses pendidikan dan ekonomi bagi perempuan dan anak perempuan.
Kekerasan Sosio-Ekonomi	Kekerasan mencakup diskriminasi, pembatasan, atau penolakan terhadap pergerakan, kesempatan, atau layanan berdasarkan jenis kelamin atau gender, pengasingan sosial, praktik hukum yang menghalangi perempuan dan anak perempuan dalam mendapatkan pelatihan dan akses terhadap hak-hak sipil, sosial, ekonomi, budaya dan politik..

Kekerasan berbasis gender merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia menyebabkan dampak jangka panjang bagi korban dan penyintas. Luka yang didapat tidak hanya luka fisik saja, namun

juga meninggalkan berbagai masalah kesehatan, luka mental/psikologis, hingga mempengaruhi kondisi sosio-ekonomi yang merusak martabat, harga diri, serta kualitas korban maupun penyintas. Efek jangka panjang tersebut kemudian dapat menempatkan korban dalam situasi yang memungkinkan untuk tereksposnya identitas dan risiko menjadi korban kekerasan berbasis gender kembali. Tidak hanya itu, minimnya hukuman bagi pelaku dan perlindungan bagi korban dapat menciptakan lingkaran setan kekerasan berbasis gender yang terus terulang. Dampaknya pun akan memperparah kondisi korban maupun penyintas seperti dikucilkan, ditolak, hingga diasingkan oleh masyarakat, termasuk keluarga. Hal ini tidak memungkiri bahwa kemungkinan besar korban akan kembali menjadi korban kekerasan berbasis gender ketika mereka mencoba untuk mencari perlindungan, bantuan, atau akses untuk memperjuangkan keadilan sebagai korban kekerasan berbasis gender (WHO, 2021).

Maka dari itu, di beberapa negara, kekerasan berbasis gender masihlah tabu dan masih dianggap sebagai masalah pribadi. Dalam konteks *Aurat March*, isu kekerasan berbasis gender di Pakistan yang diperjuangkan untuk dihentikan adalah pembunuhan, penculikan, pemerkosaan/pemerkosaan geng, *honour killings*, bunuh diri, praktik-praktik budaya tradisional Pakistan, serta kasus kekerasan terhadap perempuan lainnya (KDRT, kekerasan terkait mahar pernikahan, kekerasan menggunakan zat asam, pembagian warisan, pernikahan anak dan pernikahan paksa) (Aurat Foundation, 2020).

D. HIPOTESA

Aurat March melakukan advokasi untuk mendorong penghapusan kekerasan berbasis gender di Pakistan dengan cara:

1. Menyebarkan informasi dan sosialisasi tentang isu kekerasan berbasis gender, serta mencari bantuan maupun bertukar informasi dengan aktor advokasi lain.
2. Menjadikan *Aurat March* sebagai simbol perjuangan perempuan Pakistan dalam menghapuskan kekerasan berbasis gender.
3. Menarik perhatian publik figur berpengaruh di Pakistan seperti selebriti, jurnalis, politikus, akademisi, cendekiawan, aktivis, hingga anggota majelis nasional dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan maupun praktik yang dilakukan Pakistan.
4. Menekan pemerintah Pakistan untuk bertanggungjawab atas hak-hak fundamental yang dilanggar, termasuk pembuatan kebijakan terkait kekerasan berbasis gender.

E. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berfokus kepada pemanfaatan data yang bersifat deskriptif dan tidak melibatkan angka hitungan dalam penelitiannya. Tujuan metode penelitian kualitatif adalah menemukan pola hubungan variabel yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang mempunyai nilai prediktif kompleks, serta memperoleh pemahaman

makna. Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen utama, sehingga peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif harus memiliki wawasan yang luas untuk memahami topik yang akan diteliti (Sugiyono, 2013).

Teknik pengambilan data metode penelitian kualitatif bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan. Data-data tersebut dapat diperoleh dari observasi partisipan (ucapan dan tindakan responden), wawancara secara mendalam, dokumentasi, dokumen pribadi, catatan lapangan, serta dokumen dan sumber data yang terpercaya lainnya. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif dan berlangsung secara terus-menerus sejak awal hingga berakhirnya penelitian. Proses yang dilalui untuk mengolah data tersebut dimulai dari mencari pola, model, tema/topik, dan teori. Setelah itu, peneliti harus menyusun dan membuat laporan hasil penelitian secara mendetail dan rinci (Sugiyono, 2013).

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Penelitian ini juga akan berfokus kepada penjelasan dan penjabaran bersifat analisis tentang strategi yang dilakukan *Aurat March* Pakistan dalam mendorong penghapusan kekerasan berbasis gender di Pakistan. Dengan demikian, penelitian ini tidak keluar dari pembahasan yang telah ditentukan.

G. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan strategi *Aurat March* dalam mendorong penghapusan kekerasan berbasis

- gender maupun mencapai kesetaraan gender di Pakistan.
2. Menjelaskan pengaruh dari strategi advokasi yang telah dilakukan *Aurat March* maupun aktor lain dalam mendorong penghapusan kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap perempuan, sekaligus mencapai kesetaraan gender di Pakistan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. berisikan latar belakang gerakan perempuan dan kekerasan berbasis gender di Pakistan, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, tujuan, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II. membahas deskripsi mengenai profil *Aurat March* dan respon publik terhadap *Aurat March*.

BAB III. memaparkan analisis strategi yang digunakan dan hasil dari advokasi *Aurat March* dalam menghapuskan kekerasan berbasis gender di Pakistan.

BAB IV. menjadi bab penutup dan berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, termasuk saran/rekomendasi.